



PEDOMAN TEKNIS

BULAN

(Bulungan Akuntabilitas Non Tunai)

Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah
yang Transparan, Akuntabel, Efisien
dan Berintegritas melalui Transaksi Non Tunai



TRANSAKSI
NON TUNAI



AMAN &
TERPERCAYA



AKUNTABEL &
TRANSPARAN



EFISIEN &
EFEKTIF



MELAYANI
DENGAN INTEGRITAS

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

TAHUN 2025



NON TUNAI



AMAN



AKUNTABEL



EFISIEN



MELAYANI

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi dalam tata kelola keuangan daerah menuju sistem yang lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penerapan transaksi keuangan secara non tunai pada seluruh proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Bulungan berkomitmen mendukung implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik. Penggunaan transaksi non tunai tidak hanya mempercepat proses administrasi keuangan, tetapi juga mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan dana, mengurangi penggunaan uang tunai, meningkatkan ketepatan pencatatan transaksi, serta memperkuat pengawasan dan audit.

Namun demikian, implementasi transaksi non tunai masih menghadapi beberapa tantangan, seperti perbedaan tingkat pemahaman aparatur, keterbatasan integrasi sistem, serta perlunya peningkatan koordinasi antara perangkat daerah dengan lembaga perbankan dan instansi terkait.

Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulungan mengembangkan inovasi **BULAN (Bulungan Akuntabilitas Non Tunai)**, yaitu sebuah inovasi yang mengintegrasikan kebijakan, sistem, pendampingan, monitoring, dan evaluasi penerapan transaksi non tunai pada seluruh perangkat daerah sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, aman, dan sesuai dengan prinsip good governance.

2. Tujuan

Inovasi BULAN bertujuan untuk:

- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan transaksi non tunai.
- Mewujudkan sistem pembayaran pemerintah daerah yang lebih transparan, efisien, dan terdokumentasi secara digital.
- Mengurangi potensi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan keuangan daerah.
- Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap transaksi keuangan pemerintah daerah.
- Mendukung percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
- Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan kepada perangkat daerah, pihak ketiga, dan masyarakat.

3. Sasaran

Sasaran pelaksanaan inovasi BULAN meliputi:

- Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
- Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Penyedia barang dan jasa pemerintah.
- Mitra perbankan sebagai pendukung sistem transaksi non tunai.
- Tim Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

BAB II

RUANG LINGKUP INOVASI

Ruang lingkup inovasi BULAN meliputi:

1. Penerapan transaksi pembayaran non tunai pada seluruh belanja daerah.
2. Digitalisasi pembayaran kepada pihak ketiga.
3. Digitalisasi pembayaran perjalanan dinas.
4. Digitalisasi pembayaran honorarium, insentif, dan belanja operasional sesuai ketentuan.
5. Integrasi sistem pembayaran dengan aplikasi pengelolaan keuangan daerah.
6. Monitoring dan evaluasi implementasi transaksi non tunai.
7. Pendampingan dan peningkatan kapasitas aparatur.
8. Penyusunan laporan implementasi transaksi non tunai.
9. Koordinasi dengan perbankan dan instansi pendukung.
10. Pengembangan inovasi digital dalam tata kelola keuangan daerah.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Tahap Persiapan

- Penyusunan kebijakan pelaksanaan.
- Identifikasi kebutuhan perangkat daerah.
- Koordinasi dengan bank mitra.
- Penyusunan petunjuk teknis.

2. Tahap Sosialisasi

- Sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah.
- Pelatihan operator dan bendahara.
- Penyampaian prosedur transaksi non tunai.

3. Tahap Implementasi

- Pelaksanaan transaksi non tunai pada seluruh proses pembayaran.
- Integrasi dengan sistem informasi keuangan daerah.
- Pendampingan teknis kepada perangkat daerah.

4. Tahap Monitoring

- Monitoring kepatuhan penggunaan transaksi non tunai.
- Evaluasi kendala pelaksanaan.
- Penyusunan rekomendasi perbaikan.

5. Tahap Evaluasi dan Pengembangan

- Evaluasi capaian indikator.
- Penyempurnaan sistem.
- Pengembangan fitur digital.
- Replikasi praktik baik pada seluruh perangkat daerah.

Alur Pelaksanaan

Persiapan



Implementasi Program



Monitoring



Evaluasi



Pengembangan Berkelanjutan

BAB IV

INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur efektivitas inovasi, berikut adalah indikator utama yang harus dicapai:

NO	INDIKATOR	TARGET
1	Persentase transaksi pemerintah yang dilakukan secara non tunai	$\geq 95\%$
2	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan transaksi non tunai	100%
3	Penurunan penggunaan uang tunai dalam transaksi pemerintah	Signifikan setiap tahun
4	Ketepatan waktu proses pembayaran	Meningkat
5	Jumlah temuan administrasi terkait transaksi keuangan	Menurun
6	Kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan	100%
7	Kepuasan perangkat daerah terhadap sistem pembayaran	Baik
8	Efektivitas monitoring transaksi keuangan	Meningkat
9	Kualitas laporan keuangan daerah	Semakin akurat dan tepat waktu
10	Peningkatan nilai implementasi ETPD Kabupaten Bulungan	Meningkat setiap tahun

BAB V

PENUTUP

Inovasi **BULAN (Bulungan Akuntabilitas Non Tunai)** merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Melalui penerapan transaksi non tunai secara menyeluruh, diharapkan proses pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efisien, aman, terdokumentasi dengan baik, serta mendukung penguatan pengawasan internal maupun eksternal.

Pedoman teknis ini menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan inovasi BULAN secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta mendukung terwujudnya pemerintahan Kabupaten Bulungan yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.